

PAN Surakarta Ganti Zaenal Arifin

SURAKARTA — Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Surakarta akhirnya memutuskan mengganti legislatornya, Zaenal Arifin, yang telah menjadi narapidana dalam kasus korupsi. Penggantian tersebut dilakukan setelah Zaenal mengajukan surat pengunduran diri.

Ketua DPD PAN Surakarta Umar Hasyim menyebutkan Zaenal mengirim surat pengunduran diri pekan lalu. "Pengajuan pengunduran diri itu kami bahas dalam rapat harian," kata dia kemarin. Dalam rapat harian itu, pengurus partai menyetujui pengunduran diri yang diajukan Zaenal.

Menurut Umar, selanjutnya partai akan segera mengirim usulan pemberhentian Zaenal sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta kepada pemimpin Dewan sekaligus ditembuskan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Sesuai dengan mekanisme dalam penggantian antarwaktu, Umar mengatakan, mereka telah menyiapkan pengganti Zaenal untuk diusulkan menduduki kursi Dewan. "Dia akan digantikan pemilik suara di bawahnya, dari daerah pemilihan yang sama," katanya. Sesuai dengan hasil pemilihan umum lalu, calon yang dimaksud adalah Muhammad Al Amin.

Zaenal Arifin berhasil menjadi legislator dalam Pemilihan Umum 2009 dari daerah pemilihan Kecamatan Laweyan. Dia memperoleh 1.556 suara. Sedangkan Al Amin pada saat itu gagal menjadi legislator lantaran kalah hanya dua suara dari Zaenal.

Saat dimintai konfirmasi mengenai hal ini, Zaenal Arifin mengatakan surat pengunduran diri itu telah ia kirim ke partai sejak pekan lalu. "Saya ingin kembali mendesain batik," kata dia.

Seperti pernah diberitakan, sejumlah anggota DPRD Surakarta periode 1999-2004 divonis bersalah melalui putusan Mahkamah Agung lantaran terbukti mengorupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta tahun 2003. Mereka mendapat hukuman satu tahun penjara, yang dijalani sejak April tahun ini. Zaenal saat ini sedang dalam masa asimilasi. ● AHMAD RAFIQ

Ada Isu Penggeledahan, Mahasiswa Papua Resah

"Keamanan semua mahasiswa asal Papua di Yogyakarta terjamin."

YOGYAKARTA — Maraknya isu penggeledahan asrama-asrama mahasiswa Papua di Jakarta meresahkan mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apalagi belakangan muncul pesan pendek (SMS) melalui telepon seluler yang meminta mereka segera pergi meninggalkan Yogya. Pesan yang tak jelas pengirimnya itu beredar sejak pekan lalu.

"Seolah dikabarkan kalau Yogyakarta sudah tidak aman bagi kami," kata Papson, salah satu mahasiswa angkatan 2007 asal Papua, kemarin.

Pesan pendek menyatakan bahwa pada 1 Desember nanti akan ada pengibaran bendera Bintang Fajar/Bintang Kejora di seluruh tanah Papua dan ada upacara di lapangan Teselawai.

Juga dikatakan bahwa Papua kini negara merdeka serta mulai 26 November nanti transportasi darat, udara, dan laut akan dihentikan. "Awas, sebelum terjadi, harus selamatkan nyawa Anda," demikian tertulis dalam pesan pendek.

Pesan pendek itu membuat kegiatan mahasiswa Papua di DIY terbatas. Mereka hanya pergi ke kampus untuk kuliah, lalu langsung pulang ke tempat kos.

Di Bogor dan beberapa kota lain, menurut Papron, sejumlah mahasiswa asal Papua sudah pulang ke Papua. Mereka khawatir akan ada *sweeping*, seperti yang pernah dilakukan terhadap mahasiswa Timor Leste.

Juru bicara Kepolisian Daerah DIY, Anny Pudjiastuti, menjamin tidak akan ada *sweeping* maupun penangkapan terhadap mahasiswa asal Papua. "Keamanan semua mahasiswa asal Papua di Yogyakarta

terjamin," kata dia.

Anny menambahkan, Kepala Polda DIY Tjuk Basuki hanya menginstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan. Ini dimaksudkan agar jika terjadi kekacauan, bisa segera diatasi.

Hal serupa ditegaskan Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Ajun Komisaris Besar Mustaqim kepada *Tempo*. Bahkan, menurut dia, laporan soal penggeledahan asrama-asrama Papua di Yogyakarta tidak ada. "Sejauh ini masih kondusif," kata dia.

Sementara itu, kemarin petang aliansi mahasiswa berbagai daerah di Yogyakarta, yang mengatasnamakan Solidaritas Anak Bangsa untuk Kemanusiaan, mengadakan aksi "Peduli Papua". Mereka melakukan *long march* dari Asrama Putri Aceh di Jalan Kartini, kawasan Sagan, Yogyakarta, menuju bundaran Universitas Gadjah Mada.

● PITO AGUSTIN RUDIANA | ADDI MAWAHIBUN IDHOM



Naik Harga

Seorang pedagang sayuran melayani pembeli di los sayuran Pasar Gede, Solo, kemarin. Saat musim hujan seperti saat ini, setiap hari harga sayuran mengalami kenaikan akibat berkurangnya hasil panen.

ANDRY PRASETYO (TEMPO)

Belanja Rutin Sleman 2012 Tetap Tinggi

SLEMAN — Tahun depan belanja rutin atau belanja tak langsung Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih tinggi. Dalam rapat paripurna kemarin terungkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sleman untuk belanja rutin 2012 masih mencapai 70,6 persen.

"Tahun 2012, masyarakat Sleman belum menikmati hasil pembangunan. Sebagian besar tersedot untuk gaji pegawai negeri," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sleman yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Farchan Hariem, se usai rapat

paripurna.

APBD 2012 Sleman direncanakan Rp 1,321 triliun. Anggaran ini defisit Rp 56,93 miliar karena pendapatan daerah diperkirakan hanya Rp 1,264 triliun. Sementara itu, pendapatan asli daerah terbesar diproyeksikan datang dari pajak dan retribusi, yang ditargetkan mencapai Rp 220,3 miliar.

Dari jumlah tersebut, alokasi untuk belanja tidak langsung—gaji pegawai dan kegiatan rutin—mencapai Rp 935,5 miliar (70,6 persen). Sedangkan belanja langsung untuk pembangunan dan program pelayanan masyarakat hanya sebesar Rp

388,15 miliar (29,4 persen).

Rapat paripurna itu menghadirkan Bupati Sleman Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu. Soalnya, menurut dia, alokasi belanja rutin ini naik Rp 52 miliar dibanding tahun lalu.

Yang mengesankan, menurut Farchan, pemerintah hanya mengalokasikan belanja modal investasi sebesar Rp 6,5 miliar. "Mau buat stimulan ekonomi baru apa dengan dana sekecil itu? Ini seperti tidak niat," kata dia.

Kritik juga dikemukakan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Ketua Fraksi Golkar Nurcholis, mis-

alnya, meminta pemerintah lebih giat berusaha mendongkrak potensi penyumbang pendapatan asli daerah.

"Kami melihat banyak pemasukan dan target yang tak sesuai kondisi lapangan, seperti reklame yang marak di Sleman dan potensi pasir Merapi yang dikelola desa. Kami minta ada transparansi pemasukan soal itu," kata Nurcholis.

Sementara itu, Bupati Sleman Sri Purnomo belum bisa dimintai keterangan terkait dengan rencana APBD 2012. Mereka langsung meninggalkan gedung DPRD begitu rapat paripurna selesai. ● PRIBADI WIGAKSONO

KILAS

Raperda Zonasi Terobosan Baru

YOGYAKARTA — Rancangan peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai menjadi terobosan baru untuk mengoptimalkan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Hingga saat ini, baru DIY dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang telah membahas raperda tersebut. "Raperda ini akan mengubah *mindset* bahwa Indonesia bukan saja negara kontinental, tapi juga laut," kata Ketua Panitia Khusus Raperda Zonasi Arif Noor Hartanto se usai dengar pendapat tentang raperda itu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY kemarin.

Kepala Dinas Perikanan DIY Sudyanto menjelaskan, wilayah pesisir dan pulau kecil DIY akan dibagi menjadi empat kawasan, yakni pemanfaatan umum, konservasi, strategis nasional tertentu, dan alur laut.

● PITO AGUSTIN RUDIANA

Swasta Diminta Kelola Maguwoharjo

SLEMAN — Sejak dibangun pada 2005, Stadion Maguwoharjo di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sama sekali tak membantu mendongkrak pendapatan asli daerah. Sebaliknya, stadion yang dibangun dengan anggaran Rp 90 miliar itu justru memberatkan. "Dalam satu tahun, pendapatan hanya sekitar Rp 350 juta, padahal biaya perawatan mencapai Rp 1,3 miliar," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sleman, Farchan Hariem, kemarin.

Dewan meminta pemerintah segera meningkatkan pendapatan stadion. Jika tidak bisa, Dewan meminta dicarikan pihak swasta untuk mengelolanya. ● PRIBADI WIGAKSONO

36 Balita Alami Gizi Buruk

PURWOKERTO — Di Kabupaten Banyumas, saat ini ada 36 anak di bawah lima tahun yang menderita gizi buruk. Jumlah tersebut merupakan total penderita dua tahun terakhir. "Kalau tahun ini tercatat ada enam penderita gizi buruk," kata pegiat sosial dari Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banyumas, L.P.A.S. Widyaningrum, kemarin.

Untuk menangani pasien balita gizi buruk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan bantuan Rp 4 juta per balita. Anggaran itu diberikan dalam bentuk makanan bayi langsung kepada keluarganya. ● ARIS ANDRIANTO